

**PARTISIPASI GOVERNANCE DALAM PEMBERDAYAAN  
PELAKU USAHA KECIL DAN MENENGAH DI  
KECAMATAN PASANGKAYU KABUPATEN MAMUJU  
UTARA**

**Mutmainna<sup>1</sup>, Burhanuddin<sup>2</sup>, Nasrul haq<sup>3</sup>**

1) Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar

2) Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar

3) Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar

**ABSTRACT**

*This study aimed to determine the participation of governance in empowering small and medium business actors in Pasangkayu District, North Mamuju Regency. The type of research was qualitative. The type of research was phenomenology. Data collection techniques were such as interview, observation, and documents. The result of this research was that participation in decision making had not been optimal because the training schedule was still limited. Participation in implementation, participation in benefit taking and participation in evaluation had not been maximized because there were still many communities receiving SME assistance that was not as expected. Internal factors ie human resources were running well because it could help people's lives. External factors were such as facilities and infrastructure had not been realized because the SME assistance tool provided by the Office Koperindag misused by the community.*

**Keywords:** *Participation, governance, SME empowerment*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi *governance* dalam pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara. Jenis penelitian adalah kualitatif. Tipe penelitian adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data yakni berupa wawancara, observasi dan dokumen. Hasil penelitian ini yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan belum optimal karena jadwal pelatihan yang dilaksanakan masih terbatas. Partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan manfaat dan partisipasi dalam evaluasi belum maksimal karena masih banyak masyarakat menerima bantuan UKM yang tidak sesuai yang diharapkan. Faktor internal yakni SDM sudah berjalan dengan baik karena dapat membantu kehidupan masyarakat. Faktor eksternal yakni sarana dan prasarana belum terealisasi sebab alat bantuan UKM yang diberikan oleh Dinas koperindag disalah gunakan oleh masyarakat.

**Kata Kunci:** *Partisipasi, governance, pemberdayaan UKM*

## PENDAHULUAN

Perkembangan UKM penting menyiratkan bahwa terdapat potensi yang besar atas kekuatan domestik, jika hal ini dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik, bahkan tentu akan dapat mewujudkan usaha menengah yang tangguh, pemerintah Indonesia telah menerbitkan program kebijakan ekonomi terpadu pada 15 September 2003, yang mencakup kebijakan fiskal, keuangan dan sektor riil serta kebijakan moneter. Kebijakan fiskal, keuangan dan sektor riil dituangkan didalam instruksi Presiden RI No. 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama Dengan Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund*).

Secara nyata Usaha Kecil Menengah (UKM) juga sebagai

sektor usaha yang berperan besar terhadap pembangunan nasional, terbukti telah mampu menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu dalam mengurangi jumlah pengangguran. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan basis usaha rakyat, yang secara mengejutkan mampu bertahan dimasa kritis 1997/1998. Saat itu banyak usaha besar bergelimpangan, mengalami pailit didera pahitnya krisis. Pada saat bersamaan, perbankan tidak mampu lagi membantu usaha besar karena mereka sendiri memiliki masalah pula sehingga menambah parah penderitaan usaha besar. Tidak demikian halnya dengan UKM, yang dapat bertahan pada badai krisis karena struktur keuangan mereka yang tidak banyak bergantung pada

perbankan, meski mereka tetap memanfaatkan jasa perbankan, baik untuk transaksi maupun untuk menjaga keamanan.

Sebagian besar pelaku UKM ini mengandalkan seluruh permodalannya sendiri yang bersumber pada tabungan pribadi, pinjaman dari bank, kerabat atau tetangga bahkan tak jarang yang perolehannya melalui pinjaman ke lembaga keuangan bukan bank. Misalnya koperasi dan lembaga keuangan mikro (LKM) (Darmawan, 2004).

Kabupaten Mamuju Utara tepatnya di Kecamatan Pasangkayu adalah salah satu Kecamatan yang memiliki potensi UKM yang masih belum tergarap maksimal seperti kota-kota lainnya. Sekalipun pada dasarnya UKM di Kabupaten Mamuju Utara Kecamatan

Pasangkayu setiap tahun mengalami perkembangan salah satunya adalah perdagangan di pasar, selain disebabkan oleh ketahanannya juga disebabkan semakin berkembangnya Kabupaten Mamuju Utara.

Disadari sektor UKM masih memerlukan pembinaan yang terus menerus baik dari pemerintah (Pelatihan Manajerial, Pemasaran dan Mutu Produk) juga yang tidak kalah penting peran dari pihak perbankan atau lembaga lainnya (BUMN dan BUMD) dalam rangka memberikan akses permodalan untuk mengembangkan usaha.

Pelaku UKM di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara tidak mampu bertahan misalnya, dari segi kemampuan dalam mengembangkan usaha, khususnya dibidang tekstil. Kemandirian dalam

memperbaiki taraf hidup mengenai pendapatan ekonominya masing-masing karena terhalang oleh usaha-usaha besar atau kapitalis. Selain itu, masyarakat juga dibatasi oleh pengetahuan dan keterampilan dasar dalam mengkreasikan motif, keterbatasan modal dan akses ke sumber permodalan yang layak, mudah, cepat dan tepat.

Disinilah fungsi pemerintah untuk membantu peningkatan taraf hidup masyarakat yang memiliki usaha kecil menengah (UKM), dan kebijakan pemerintah dalam bertanggung jawab untuk permasalahan mendasar UKM yaitu pembenahan masalah permodalan dan pemasaran yang akan memberi dampak terhadap produk dan jasa UKM sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan

masyarakat Kabupaten Mamuju Utara.

Oleh karena itu usaha kecil menengah (UKM) harus mendapat dukungan penuh oleh pemerintah agar UKM bisa lebih berkembang dan dapat membuka lapangan pekerjaan yang lebih besar lagi dan juga dapat mengurangi jumlah pengangguran dan juga agar perekonomian lebih stabil dengan adanya dari usaha kecil menengah.

Usaha kecil menengah juga terjadi hubungan diantara pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat, berkaitan dengan UU dan pemerintah juga membuat kebijakan terhadap UKM melalui UU No. 9 Tahun 1995 dan terbaru UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta turunan UU ke PP No 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan undang-

undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2011 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Syahyuti dalam Mappamiring (2011:38), mengemukakan bahwa partisipasi dapat didefinisikan sebagai proses dimana seluruh pihak dapat membentuk dan terlibat dalam seluruh inisiatif pembangunan.

Menurut Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Astuti D (2011: 61-63), membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Dan keempat, partisipasi dalam evaluasi.

Pengertian partisipasi dikemukakan oleh Djalal dan

Supriadi (2001: 201-202), dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian dan pendapat, barang, keterampilan, barang dan jasa, partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka membuat keputusan dan memecahkan masalahnya.

Shery Arstein (Siti Irene A.D. 2011: 64), menjelaskan peran serta partisipasi masyarakat dalam tangga partisipasi sebagai berikut: a. *Citizen power* Pada tahap ini sudah terjadi pembagian hak, tanggung jawab, dan wewenang antara masyarakat dengan pemerintah dalam pengambilan keputusan. Dimana masyarakat sebagai kontrol masyarakat (*citizen coontrol*), pelimpahan kekuasaan

(*delegated control*), dan kemitraan (*parthnership*).b. *Tokenisme* Hanya sekedar formalitas yang memungkinkan masyarakat mendengar dan memiliki hak untuk memberikan suara, tetapi pendapat mereka belum menjadi bahan dalam pengambilan keputusan. Klasifikasi ini memiliki tingkatan penentraman (*placation*), konsultasi (*consultation*), dan informasi (*information*). c. Nonpartisipasi adalah klasifikasi yang hanya menjadikan masyarakat sekedar objek dalam pengambilan sebuah kebijakan.

Perencanaan pembangunan Partisipatif menurut Hanif Nurcholis (2008), adalah suatu model perencanaan pembangunan yang mengikut sertakan masyarakat. Masyarakat aktif melibatkan diri dalam melakukan identifikasi

masalah, perumusan masalah, pencarian alternative pemecahan masalah, penyusunan agenda pemecahan, terlibat dalam proses penggondogan (konversi), ikut memantau implementasi, dan ikut aktif melakukan evaluasi.

Pemberdayaan berasal dari bahasa inggris "*impowerment*" yang dapat bermakna "pemberian kekuasaan" karena power bukan sekedar daya tapi juga kekuasaan sehingga kata "daya" tidak saja bermakna "mampu" tapi juga bermakna "mempunyai kekuasaan" (Wrihartnolo dan Dwijowitono, 2007).

Farazmand dalam Falih Suaedi (2010: 45), *governance* merupakan solusi untuk mengatasi problema yang belum teratasi dan yaang ditimbulkan oleh OPA (Farazmand menyebutnya dengan

*traditional forms of government*). Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa *governance* memiliki dua bentuk, yakni *entrepreneurial models of government* (NPM) dan *social and political governance* (NPS). Konsep *governance* tersebut kini menerima kritik. Sebagian karena tidak semua prinsip *governance* dapat dijalankan dengan mulus di negara-negara sedang berkembang. Sebagian lagi karena *governance* dipandang sebagai konsep yang bersifat imperialistik karena dipaksakan oleh lembaga-lembaga internasional untuk diterapkan di negara-negara sedang berkembang. Dalam kondisi tertentu negara maju lebih dipandang menikmati keuntungan yang lebih besar dari terbukanya pasar bebas di negara-negara sedang berkembang akibat penggunaan prinsip *governance*. Apa yang dinilai baik

oleh negara maju dan kaya belum tentu baik pula bagi negara yang sedang berkembang bagi administrasi publik, penggunaan NPM atau NPS hanya memanfaatkan sebahagian potensi *stakeholder* secara optimal dalam menyelesaikan masalah-masalah publik dan mencapai tujuan-tujuan publik dalam kondisi seperti ini.

Proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Menurutnya, tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu lawan satu antara pekerja sosial dan klien dalam setting pertolongan perseorangan. Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan dari klien, hal ini bukanlah strategi utama pemberdayaan. Namun demikian tidak semua intervensi

pekerja sosial dapat dilakukan melalui kolektivitas. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual, meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengaitkan klien dengan sumber atau sistem lain diluar dirinya. Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*): mikro, mezzo dan makro (Edi Suharto, 2010:66).

Lebih lanjut World Bank dalam Totok Mardikanto (2015: 28), pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat dan atau kebutuhannya, pilihan-pilihannya,

berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakatnya secara bertanggung-gugat (*accountable*) demi perbaikan kehidupannya.

Riki Septiawan (2012), faktor-faktor yang mempengaruhi Usaha Kecil dan Menengah yaitu: 1. Faktor internal: a. Kurangnya Permodalan dan Terbatasnya Akses Pembiayaan Permodalan, b. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), c. Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar, d. Mentalitas Pengusaha UKM, e. Kurangnya Transparansi. 2. Faktor eksternal: a. Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif, b. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha, c. Pungutan Liar, d. Implikasi Perdagangan Bebas, e. terbatasnya Akses Pasar, f. Terbatasnya Akses Informasi.



## METODE PENELITIAN

Penelitian ini telah dilaksanakan selama 2 bulan di Kantor Dinas Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara. Alasan penulis memilih lokasi ini dikarenakan di Kantor Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara masih banyak pelaku UKM yang belum mendapatkan partisipasi pemerintah dan mendapatkan produktivitas dan kesejahteraan para pelaku UKM Jenis penelitian menggunakan kualitatif. sumber data data penelian ini adalah data primer dan data sekunder. Informan penelitian sebanyak 7 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi pemerintah merupakan keterlibatan pemerintah

mamuju utara dalam menjalankan wewenang yang telah ditugaskan kepada mereka agar menjalankan dengan baik, indikator yang akan dilihat yaitu (a) Partisipasi dalam pengambilan keputusan, (b) Partisipasi dalam pelaksanaan, (c) Partisipasi dalam pengambilan manfaat, dan (d) Partisipasi dalam evaluasi.

Dalam partisipasi masyarakat mengenai pemberdayaan UMKM ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, faktor ini berdampak pada para pelaku usaha kecil dan menengah di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara. Adapun faktor yang mempengaruhi antara lain: faktor internal yaitu sumber daya manusia, faktor eksternal yaitu sarana dan prasarana.

Kepala Dinas Koperindag mengadakan musyawarah dalam pengambilan keputusan yang dihadiri oleh pelaku UKM dengan mengeluarkan ide-ide atau pendapatnya mengenai program pemberdayaan UKM yang ikut mengadakan rapat atau pertemuan dan membahas mengenai masalah UKM seperti kualitas SDM yang masih rendah, selain itu Kepala Dinas Koperindag juga berupaya meningkatkan kesejahteraan pelaku UKM serta dalam musyawarah juga membicarakan tentang solusi bagaimana memberdayakan masyarakat pelaku UKM agar dapat sejahtera.

Dalam pengambilan keputusan Kepala Dinas Koperindag perlu mengadakan pelatihan kepada masyarakat pelaku UKM khususnya sebagai tukangjahit. Pelatihan

diarahkan langsung oleh tim penyuluh dan diadakan satu kali dalam sebulan serta pelatihan ini diadakan di tempat yang telah disiapkan oleh Pemerintah Daerah. Tujuan dari pelatihan adalah untuk memberikan atau mengarahkan masyarakat pelaku UKM khususnya sebagai penjahit terhadap program yang dijalankan.

Partisipasi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Koperindag di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara yaitu mengupayakan untuk memberdayakan masyarakat pelaku UKM dengan cara memberikan bantuan dengan mendirikan tempat yang namanya UPT sebagai tempat kegiatan administrasi serta kegiatan-kegiatan lain seperti musyawarah dan pelatihan-pelatihan khusus kepada masyarakat pelaku UKM.

Pemerintah mengharapkan agar bantuan ini dapat memudahkan masyarakat sebagai pelaku UKM dalam menjalankan usaha dengan baik dan maksimal.

Upaya pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Utara yang ingin memberdayakan masyarakat pelaku UKM sehingga Kepala Bidang UKM mengoptimalkan dengan baik bantuan yang ada yaitu UPT yang merupakan tempat melakukan kegiatan-kegiatan administrasi, musyawarah, dan memberikan pelatihan-pelatihan khusus kepada pelaku UKM dengan tujuan agar memudahkan masyarakat dalam menjalankan sebuah usaha dengan baik dan maksimal sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Bantuan program pemberdayaan UMKM yang

diberikan oleh pemerintah sangat membantu masyarakat. Namun, Pelaku UKM merasa bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah belum efektif sebab dalam program ini pemerintah tidak menjelaskan secara detail bahwa untuk dapat menerima bantuan tersebut ada beberapa prosedur yang harus dilakukan. Seperti mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan maupun kegiatan administrasi lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sehingga dengan begitu bantuan tersebut dapat diterima dan digunakan sebagaimana mestinya oleh masyarakat.

Koordinasi yang dilakukan dengan mengadakan kerjasama antara semua lapisan stakeholders, swasta, dan masyarakat terkait program partisipasi dalam pelaksanaan yakni berupa kegiatan

administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan program UMKM. Dengan adanya kegiatan administrasi tersebut diharapkan program pemberdayaan UMKM dapat terlaksana dengan baik, serta dengan partisipasi antara ketiga unsur tersebut dapat membantu kelancaran program bantuan UKM yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sehingga tujuan untuk membangun dan memberdayakan pelaku UKM akan berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat pelaku UKM.

Pelaksanaan kegiatan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait program pemberdayaan masyarakat UMKM dengan melakukan pelatihan-pelatihan sudah berjalan dengan baik. Namun banyak masyarakat

yang belum puas dengan adanya kegiatan tersebut. Karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga mereka tidak mengetahui apa dan bagaimana caranya mendapatkan bantuan program UMKM tersebut.

Koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui partisipasi pelaksanaan dalam pemberdayaan UKM memang sudah terlaksana oleh pemerintah daerah yakni melakukan kerjasama antara *stakeholder*, swasta dan masyarakat namun, kerjasama tersebut belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.

Seperti yang terjadi dalam masyarakat kecil yang tergolong sebagai masyarakat yang diberdayakan oleh pemerintah terkadang beranggapan bahwa mereka tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Mereka juga merasa

bahwa apa yang diharapkan dari pemerintah tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Seharusnya pemerintah, swasta dan masyarakat berada pada titik koordinasi yang sama dengan bekerjasama yang baik sehinggalpelaku UKM juga dapat memahami dan menerima apa yang diberikan oleh pemerintah. Jika kerjasama yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat UKM berjalan baik, maka diharapkan dapat memberikan hasil yang memuaskan terkait program pemberdayaan UKM tersebut.

Kerjasama yang dijalin antara berbagai pihak yang bersangkutan dalam pemberdayaan masyarakat pelaku UKM diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya kepada pelaku UKM itu sendiri. Pemerintah daerah dalam hal ini

Kepala Dinas UMKM berpartisipasi dalam program pemberdayaan UKM dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat kecil yang tadinya berada di bawah garis kemiskinan kemudian dapat meningkat. Kerjasama yang dijalin dari semua pihak yang bersangkutan mulai dari musyawarah yang dilakukan untuk mengetahui berbagai permasalahan yang dihadapi untuk menemukan solusi, koordinasi dilakukan dengan tujuan agar kerjasama selalu berjalan dengan baik, pelatihan-pelatihan serta pengawasan dilakukan agar masyarakat pelaku UKM dapat berdaya dan memiliki penghasilan yang baik.

Kepala Dinas Koperindag berharap agar masyarakat yang ada di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara memiliki

lapangan pekerjaan sehingga Kepala Dinas Koperindag mengeluarkan program khususnya kepada masyarakat pelaku UKM agar masyarakat bisa menjalankan usaha-usahanya sehingga tidak ada lagi pengangguran atau masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan khususnya di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara.

Dalam sebuah organisasi sering terjadi konflik antara atasan dan bawahan atau antar sesama oleh karena itu pemerintah daerah mengupayakan untuk selalu mengawasi setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam program pemberdayaan masyarakat pelaku UKM. Pengawasan yang dijalankan pemerintah daerah sesuai dengan jadwal yakni setiap pagi pada pukul 07.30-09.00 dan pada sore hari yaitu pukul 14.30-16.00. Tujuan dari

pengawasan tersebut untuk mengawasi masyarakat pelaku UKM yang ingin menggunakan bantuan yang disediakan di UPT agar tidak terjadi kesalahan maupun kecurangan untuk itu masyarakat pelaku UKM yang menerima bantuan tersebut didaftar dalam buku administrasi terlebih dahulu sehingga bantuan yang diberikan dapat digunakan dengan baik sesuai dengan harapan.

Pemerintah daerah melakukan upaya penanggulangan terhadap masyarakat khususnya pelaku UKM untuk mengatasi pengangguran yang ada di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara. Upaya penanggulangan ini diharapkan dapat meminimalisir angka pengangguran sehingga kemiskinan di daerah ini dapat diatasi secara optimal.

Kualitas SDM sangat penting bagi seseorang khususnya pembina dalam hal ini seluruh instansi pemerintah yang memiliki wewenang dalam program pemberdayaan UKM sehingga dalam pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Secara etimologi memiliki perbedaan, namun keduanya memiliki keterkaitan yang sangat penting sebagai alat penunjang keberhasilan suatu proses yang dilakukan. Dengan demikian suatu proses kegiatan yang akan dilakukan tidak akan mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana jika sarana dan prasarana tidak tersedia.

### KESIMPULAN

partisipasi dalam pengambilan keputusan belum

optimal karena jadwal pelatihan yang dilaksanakan masih terbatas. Partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan manfaat dan partisipasi dalam evaluasi belum maksimal karena masih banyak masyarakat menerima bantuan UKM yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Faktor internal yakni sumber daya manusia sudah berjalan dengan baik karena dapat membantu kehidupan masyarakat. Faktor eksternal yakni sarana dan prasarana belum terealisasi sebab alat bantuan UKM yang diberikan oleh Dinas koperindag disalah gunakan oleh masyarakat.

Dari kesimpulan di atas, maka perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut: pelunya peningkatan pemahaman terhadap masyarakat akan pentingnya ikut

berpartisipasi dalam program pemberdayaan UKM agar usaha yang dijalankan sesuai dengan harapan termasuk dalam pelatihan, pembinaan maupun memberikan pengetahuan serta bantuan agar usaha masyarakat semakin meningkat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Djalal, Fasli dan Dedi Supriadi. 2001. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya.
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mappamiring. 2011. *Partisipatif Manajemen Pengelolaan*. Makassar: YAPMA Makassar.
- Mardikanto, Totok, Soebianto, Poerwoko. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nurcholis, Hanif. 2008. *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Septiawan, Riki. 2012. *Makalah: Identifikasi Perkembangan Usaha Kecil di Indonesia dan Permasalahan yang dihadapinya*. Bandung.
- Suaedi, Falih, Wardiyanto, Bintoro. 2010. *REFITALISASI ADMINISTRASI NEGARA (Reformasi Birokrasi dan e-Governance)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sundariningrum. 2001. *Partisipasi Masyarakat*. Yogyakarta: Pelajar.
- Wrihatnolo, R. R. dan Riant Nugroho Dwijowitono. 2007. *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Elex Media kupertindo.